

IMPLEMENTASI NILAI KETUHANAN DAN KEMANUSIAAN PANCASILA

DALAM PEMBERDAYAAN ORANG MISKIN

Oleh Suroso

A. Pendahuluan

Setelah Indonesia memproklamsikan kemerdekaan 61 tahun yang lalu, apakah benar-benar kemerdekaan itu sudah dirasakan oleh rakyat pada umumnya? Secara teritorial memang Indonesia tidak dijajah oleh bangsa lain, namun secara psikologis penjajahan masih dilakukan oleh bangsa lain, dalam bentuk “penjajahan ekonomi”, “penjajahan budaya” dan “penjajahan perilaku”. Akibatnya, bangsa Indonesia kehilangan jati diri, kehilangan watak bangsa, yang oleh Presiden Soekarno disebut *Indonesian Nation Character* atau watak bangsa Indonesia. Walaupun klaim, Indonesia masuk negara berkembang masih ada 30 jutaan masyarakat hidup dalam kemiskinan.

Dari pengamatan sekilas, pasca 61 tahun merdeka, fenomena terkikisnya watak bangsa itu bagaikan virus yang menyebar ke mana-mana yang menyebabkan kelumpuhan. Akibatnya bangsa ini menjadi sakit. Kasus korupsi yang tidak pernah berhenti dibicarakan di media. Kasus perkelaian antar warga yang terjadi di mana-mana. Kasus kekerasan rumah tangga, eksploitasi atas anak dan tenaga kerja, dan kasus “perkelaian” fisik para politisi, membuktikan bahwa Indonesia sedang terserang virus karakter ketidakjujuran, sindrom kekuasaan, dan bakteri kebohongan.

Namun demikian, klaim bahwa Indonesia adalah negara demokrasi kelas wahit, pertumbuhan ekonomi makro Indonesia tumbuh pesat, optimis kita akan menjadi negara maju, masih harus disandingkan fakta bahwa Indonesia masih memiliki 30 jutaan warga miskin, dengan infrastruktur yang masih buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah dibandingkan negara selevel Asia Tenggara. Di bidang politik, walaupun sudah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 pascareformasi, dengan pemilihan secara langsung presiden, gubernur, bupati dan walikota, hasilnya belum memuaskan karena terjadinya politik uang. Akibatnya, pertumbuhan provinsi, kabupaten, kota di Indonesia belum optimal. Belum lagi, keinginan sebagian provinsi/kab di Indonesia untuk membentuk provinsi atau kabupaten baru.

Persoalannya terlalu kompleks diuraikan dalam artikel yang sangat terbatas ini. Namun demikian, perlu ada kesadaran bersama dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya bangsa melalui pendidikan, kepemimpinan, dan campur tangan media untuk menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, berisi nilai-nilai luhur yang mempersatukan dan menyejahterakan bangsa.

Menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, selain dilakukan secara formal di lembaga pendidikan sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, nilai itu harus disampaikan oleh para petinggi negara, tokoh masyarakat, dan generasi muda dalam berbagai konteks. Fakta menunjukkan bahwa paham materialisme menjauhkan diri pada kolektivisme dan belarasa yang merupakan ciri kebersamaan bangsa. Sifat-sifat demikian pada akhirnya akan menimbulkan sifat egoisme, individualisme, dan hedonisme, yang lebih menghormati paham kebendaan daripada sifat rohani bangsa Indonesia.

Tulisan ini ingin menginformasikan persoalan kebangsaan dengan fokus implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan dalam berbagai konteks, khususnya belarasa terhadap orang miskin dan pembentukan karakter nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan kebangsaan.

B. Sosialisasi Nilai Pancasila

Pada era Orde Baru, secara formal pemerintah menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui TAP MPR NO II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di sekolah dan di masyarakat. Siswa, mahasiswa, organisasi sosial, dan lembaga-lembaga negara diwajibkan untuk melaksanakan penataran P4. Selain sosialisasi nilai Pancasila dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan, dalam kegiatan penataran juga disampaikan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Namun setelah 20 tahun berjalan, kegiatan tersebut nyaris berhenti pada era reformasi 1998. Trauma kekuasaan Orde Baru yang begitu besar, menjadi penyebab ketidakpercayaan terhadap produk yang dihasilkan, termasuk penataran P4. Produk yang telah dilaksanakan oleh Orde baru dinihilkan. Bahkan, lembaga-lembaga yang menyelenggarakan penataran P4 seperti Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (BP7) berubah fungsi, Depdiknas tidak menyelenggarakan penataran P4 di sekolah dan Perguruan Tinggi, apalagi organisasi sosial masyarakat dan pemuda. Sebagai gantinya, sekarang Depdiknas melaksanakan Program Pendidikan Karakter. Namun, kritik terhadap pendidikan karakter terus berjalan seperti dikemukakan Nursalam Siradjuddin (2010). Membangun karakter dari pintu pendidikan harus dilakukan secara komprehensif-integral, tidak hanya melalui pendidikan formal, namun juga melalui pendidikan informal dan non formal. Selama ini, ada kecenderungan pendidikan formal, informal dan non formal, berjalan terpisah satu dengan yang lainnya. Akibatnya, pendidikan karakter seolah menjadi tanggung jawab secara parsial.

C. Pancasila, Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan

Menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan dengan berbicara, namun juga dengan contoh, dengan gaya hidup manusia Pancasila. Pada aras pendidikan, semua guru, dosen, widyaiswara, pelatih, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan. *Pertama*, pada aras ketuhanan, manusia Indonesia selalain mencintai Tuhan, juga sanggup mencintai sesama tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Butir sila Ketuhanan Yang Maha Esa (1) hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup; (2) saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan (3) tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain, nampaknya masih sebatas retorika. Pelarangan pendirian tempat ibadah, pemaksaan kehendak seperti menutup usaha di bulan puasa, bahkan memaksakan kehendak dengan kekerasan yang dilaksanakan orang yang mengatasnamakan agama, tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang disebutkan di atas.

Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan para pemimpin dan tokoh agama dapat melakukan hal-hal berikut. Kedua, dalam memberikan siraman rohani para pendakwah dan penceramah agama perlu menekankan toleransi antarumat beragama, toleransi sebagai bangsa yang berbhineka, dan merlarang berbagai bentuk kekerasan, dan menekankan adanya pluralitas dan multikulturalisme. Walaupun negara kita dikenal dunia sebagai negara

berpenduduk muslim terbesar di dunia, namun rakyat Indonesia tidak pernah merasa menjadi negara muslim, tetapi tetap menjunjung tinggi negara Pancasila.

Ketiga, setiap warga negara harus berlomba-lomba memberi contoh baik dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Menghormati antarpemeluk agama, menghormati perbedaan sebagai suku bangsa, menghormati perbedaan ras, dan golongan. Berlomba-lomba untuk mengasihi sesama umat manusia, sesama bangsa Indonesia, khususnya mereka yang miskin dan papa. Jangan hanya merasa kasihan dengan mereka yang miskin, tetapi dapat berbuat untuk menolong. Menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Simpul-simpul keagamaan yang diyakini setiap warganegara makin memperkuat persaudaraan sebagai bangsa.

Keempat, pada aras kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan seperti saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan tidak hanya dipahami tetapi diaplikasikan dalam kehidupan. Nilai-nilai tersebut sangat subur dalam kultur masyarakat Indonesia. Setiap terjadi bencana nasional seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, rakyat sigap mengekspresikan nilai Pancasila tersebut secara nyata. Masyarakat membuat dapur umum, membungkus nasi, mendistribusikan kepada korban tanpa dikomando. Para dokter baik secara perorangan maupun lembaga, bersatu padu menolong merfeka yang sakit dan terluka. Lembaga masyarakat nonpemerintah membangun barak, bahkan memulihkan trauma pasca bencana. Semua yang dilakukan itu adalah gaya khas bangsa Indonesia, ketika melihat penderitaan bersama.

D. Mendahulukan yang Miskin

Kemiskinan juga disebabkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh negara tidak berpihak pada rakyat. Kebijakan yang berkaitan dengan pertanian, industri dan ketenagakerjaan, yang merupakan pilar rakyat untuk memperoleh pendapatan kurang menjadi prioritas. Akibatnya, jutaan orang menganggur dan tidak dapat memenuhi

kebutuhan makan karena tidak memiliki daya beli kebutuhan pokok. Di Banyumas, mudah ditemui masyarakat mengkonsumsi *nasi aking*, sisa nasi yang dijemur dan dimasak lagi, yang seharusnya layak untuk dimakan binatang. Di Jambi, masyarakat terpaksa mengkonsumsi talas hutan beracun karena sudah tidak ada persediaan makanan.

Menurut Prof. Dr.Sajogyo, pakar Gizi dari IPB, untuk melakukan aktivitas orang minimal harus mengkonsumsi 2.200 kalori yang dipersyaratkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan. Walaupun sudah ada provinsi yang dapat mencapai pemenuhan kalori tersebut, ternyata di Pulau Jawa baru 1700-1800 kalori per kepala/hari.¹ Pemenuhan kalori seperti tersebut di atas, tentu tidak mudah diwujudkan oleh daerah-daerah miskin yang kurang memiliki infrastruktur pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, Jakarta memiliki taksiran penduduk yang tidak bisa memenuhi Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) lebih dari 26% dan Ambon lebih dari 93%.² Dampak ketidakmampuan memenuhi kebutuhan fisik minimum berdampak pada kecerdasan dan rednahnya daya saing bangsa di forum internasional.

Menurut catatan UNDP, Indonesia menghadapi ancaman serius dalam meningkatkan mutu bangsa karena rendahnya Indeks Kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai oleh parameter buruknya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dari 178 negara, Indeks SDM Indonesia menduduki ranking 111 dari 178 negara.³ Kemiskinan, bukan hanya masyarakat tidak mampu menyediakan makan, tetapi juga pemenuhan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan terjadi di mana-mana. Banyak anggota masyarakat kekurangan gizi karena kelaparan. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka ke depan kita akan kehilangan generasi.

Menurut penelitian Bagong Suyanto, bahwa kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh kebijakan yang tidak memihak pada rakyat kecil, berkait dengan diskriminasi pengupahan terhadap buruh dan kebijakan penentuan harga yang tidak berpihak pada

¹ Tjondronegoro, Soediono M.P., "Dinamika Golongan lemah Pedesaan: Refleksi atas Karya Tulis dan Pemikiran Dr. Sajogyo" dalam *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 1996, hal 7.

² White, Benjamin, "Optimisme Makro, Pesimisme Mikro? Penafsiran Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonseia 1967 – 1987". dalam *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 1996, hal 35.

³ HDI Index, 2004

rakyat.⁴ Selain faktor diskriminasi dan kebijakan yang tidak memihak rakyat, faktor lain yang menyebabkan pemiskinan di Indonesia antara lain struktur penguasaan orang kaya terhadap orang miskin. Diperkirakan 3% orang kaya yang pada umumnya berkuasa, serta 17% kelas menengah yang relatif kaya menguasai 40% orang yang hidup *pas-pasan* dan 40% menguasai orang yang melarat mutlak yang tidak bisa hidup secara layak. Tidak kurang 1,2 milyar penduduk dunia, mungkin sekarang angkanya lebih tinggi lagi, hidup dalam kemiskinan mutlak. Dari angka itu, tidak kurang 39 juta ada di Indonesia. Artinya, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang primer seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan (air bersih dan sanitasi), kerja yang wajar dan pendidikan yang wajar tidak terpenuhi, apalagi kebutuhan sekunder seperti misalnya partisipasi; rekreasi atau lingkungan hidup yang menyenangkan. Jadi, orang miskin hidup dalam kemelaratan yang cukup jelas.⁵

Dalam keadaan negara yang terpuruk berkait dengan bencana dan kebijakan yang tidak memihak rakyat, apa yang mesti dilakukan negara? Bagaimana negara berpihak dalam pilihan cinta mendahulukan orang miskin?. Bagaimana gerakan masyarakat dalam membantu penderitaan orang miskin? Bagaimana keterlibatan negara dalam memerangi kemiskinan?

Persoalan utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih banyaknya orang miskin. Kemiskinan yang mutlak memiliki variabel ikutan seperti buruknya kesehatan dan pada akhirnya menyebabkan lemahnya kecerdasan. Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa orang miskin yang tidak dapat memenuhi makan dengan baik akan menyebabkan kesehatannya buruk, dan ketika kesehatannya buruk ia tidak dapat berpikir dengan prima yang menyebabkan kebodohan.

E. Pancasila dalam Perspektif Teologis Pemberdayaan Orang Miskin

Kesadaran berketuhanan untuk mendahulukan kaum miskin yang tidak berdaya, berarti juga memperjungkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan dan merupakan wujud kesetiaan pada Tuhan. Kaum miskin yang tidak memiliki akses mudah memenuhi kebutuhan

⁴ Bagong Suyanto, *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996, hal 71-90.

⁵ Banawiratma, JB dan Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hal. 26-127

pokok, memperoleh fasilitas kesehatan dan pendidikan, harus diberdayakan untuk memperoleh pendapatan. Yang terjadi di Indonesia saat ini tidak berbeda dengan yang ditemukan dalam Kitab Suci. Menurut G Soares Prabhu (1985) orang-orang miskin dalam kitab PL maupun PB memperlihatkan bahwa (a) kaum miskin bukan ditentukan oleh sifat religius mereka tetapi lebih disebabkan kemiskinan fisik, (b) Kaum miskin dalam Alkitab juga merupakan kaum *dialektis* yang disebabkan oleh kelompok-kelompok yang bertindak tidak adil dan menyingkirkan mereka, dan (c) Kaum miskin dalam Kitab Suci adalah kelompok *dinamis*. Mereka bukan korban-korban pasif dalam sejarah. Melalui dan bersama mereka, Allah membentuk sejarah-Nya.⁶

Refleksi pembangunan Kerajaan Allah dengan menanggulangi kemelaratan, khususnya mereka yang miskin mutlak, muncul pertanyaan siapa saja orang miskin yang mendapat prioritas untuk didahulukan.⁷

1. Menurut Kitab Perjanjian Lama (PL), Allah memperhatikan, melindungi, dan membela orang miskin yang malang. Terdapat kelompok *anawim*, kaum miskin yang hanya mengandalkan Allah saja. Sikap pasrah, sikap mengandalkan dan mempercayakan hidupnya kepada Allah saja, tidak terlepas dari kemiskinan dan penderitaan nyata yang mereka alami. Mereka adalah yang miskin secara material, fisik.
2. Menurut Kitab Perjanjian Baru (PB), kaum miskin yang dihadapi Tuhan adalah orang-orang miskin secara fisik, ekonomi, sosial, politik dan religius. Orang miskin yang dimaksud bangsa yang dijajah dan ditindas oleh penjajah, mereka yang sakit dan kaum marjinal yang tidak diikutsertakan dan tidak mempunyai suara dalam kehidupan politik. Tuhan datang membawa alternatif kehidupan baru, agar segala jenis kemiskinan diatasi. Gambaran di atas juga sedang dialami orang miskin di Indonesia. Pemanusiaan orang miskin bergayut dengan nilai-nilai ketuhanan yang dialami umat beragama di Indonesia. Adalah bertentangan dengan nilai Ketuhanan yang Maha Esa, ketika orang berupaya menyaksikan orang miskin, tetapi tidak mampu berbagi, dan berbelarasa kepada mereka.

⁶ Banawiratma, SJ, *10 Agenda Pastoral Transformatif: menuju Pemberdayaan Kaum Miskin dengan Perspektif Adil Gender, HAM, dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kanisius, 2002. Hal 22.

⁷ Banawiratma, SB dan Muller, J, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, Hal.

F. Aksi terhadap Kemiskinan

Perkiraan ahli tentang angka kemiskinan di Indonesia sangat bervariasi. Angka kemiskinan yang disusun oleh pemerintah melalui Biro Pusat Statistik (BPS) tentu berbeda angka kemiskinan yang disusun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perkiraan paling rendah kira-kira 32 % penduduk Indonesia ada di bawah garis kemiskinan. Perkiraan paling tinggi 60% penduduk Indonesia adalah orang miskin.⁸ Data-data kemiskinan akan terus berubah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 Oktober 2005 memunculkan kemiskinan baru karena makin rendahnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Kemiskinan paling tidak dapat dideskripsikan dalam dua hal yaitu kemiskinan yang realistis terjadi saat ini dan kemiskinan menurut Alkitab. Kemiskinan masa kini yang sering terjadi di belahan bumi adalah kemiskinan mutlak, berupa kemiskinan material karena kekurangan uang atau harta benda. Orang miskin biasanya terkondisi kekurangan pangan, sandang, dan papan dan berkecenderungan untuk sakit. Kemiskinan digambarkan oleh Soritua Nabaran sebagai berikut.

Kemiskinan dalam bentuk kemelaratan dan ketidakpunyaan mempunyai banyak wajah: seperti busung lapar, penyakit menular (seperti kolera, demam berdarah), ketidaktahuan, gubug berjejal di kota atau gubug dari daun kayu di desa, yaitu semua yang mengganggu, mengurangi, dan meniadakan martabat manusia.⁹ Gubug-gubug liar di bantaran sungai di kota raya Jakarta yang identik dengan kemiskinan, kantong-kantong kemiskinan di desa identik dengan ketidakberdayaan, harus dicari jawab pemecahannya agar kita tidak dicap ahumanis.

Kemiskinan menurut Alkitab digambarkan sebagai keadaan buruk atau keji yang menghina martabat manusia dan berlawanan dengan kehendak Allah. Dalam Perjanjian Lama kemiskinan disebut *ebyon*, orang yang menginginkan dan membutuhkan sesuatu,

⁸ Brownlee, Malcolm, *Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan: Dasar Teologis bagi Pekerjaan Orang Kristen dalam Masyarakat*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987, Hal. 79.

⁹ Ibid. Hal. 82.

disebut juga *dal* orang yang lemah dan trak berdaya. Dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani *ptokos* bearti orang yang bergitu melarat sehingga tidak dapat hidup kecuali mengemis.¹⁰

Menurut Alkitab kemiskinan dapat disebabkan oleh kemalasan (Ams 6:9-11; 24:30-34; 19:15), kemabukan, kebodohan, dan kerakusan (Ams 23:20-21; 21:17; 13:18; 28:19); atau malapetaka (Kej 10:4-5). Namun sebab yang paling utama disebut dalam Alkitab ialah keserakahan, pemerasan, dan penindasan yang dikutuk oleh Allah dan Nabi-Nabi Israil.

Dalam konteks keadilan sosial nsikap memperkaya diri, bahkan kegiatan korupsi yang marak pascareformasi ini bertentangan dengan nilai keadilan sosial seperti bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.

Beberapa aksi yang dapat dilakukan oleh JB Banawiratma, adalah adanya visi terwujudnya Kerajaan Allah, daya kuasa Allah yang penuh bela rasa,, yakni kuasa kebenaran dan cinta kasih, keadilan, dan damai, suka cita, dan persaudaraan semua orang. Dalam konteks kerajaan Allah melawan anti-kerajaan Allah atau Allah melawan Mamon, Tuhan memihak mereka yang menjadi korban, kaum miskin, dan menderita..¹¹

G. Refleksi Teologis Mendahulukan Orang Miskin

Mencintai sesama berarti menjadi sesama bagi orang yang setengah mati, tak berdaya, tanpa pertolongan. *Preferential option (love) for the poor*, tidak lain adalah wujud mencintai sesama sebagaimana Tuhan mencintai..¹²

Terdapat tiga bentuk keterlibatan pada kaum miskin. *Pertama*, kurang lebih terbatas, dalam bentuk kunjungan ke komunitas-komunitas orang miskin, pertemuan-pertemuan, pendampingan terbatas, dukungan terhadap komunitas-komunitas beserta gerakan-gerakan mereka. *Kedua*, kerja ilmiah, menjalankan penelitian, menyampaikan penalaran

¹⁰ Ibid. Hal 80-81.

¹¹ Banawiratma, JB. *10 Agenda Pastoral Transformatif: Menuju Pemberdayaan Kaum Miskin dengan Perspektif Adil Gender, HAM, dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, Hal.

¹² Banawiratma, JB dan Muller, J, *Bertelologi Sosial Lintas Ilmu. Kemiskinan Sebagai tantangan Hidup Beriman*. Yogyakarta: Kanisius, 1993. Hal 134-136.

profetis, kritis-kreatif, yang didorong oleh keterlibatan praktis berkaitan dengan keprihatinan komunitas tersebut. *Ketiga*, hidup di tengah rakyat dan bekerja bersama rakyat miskin.¹³ Kegiatan mengadvokasi rakyat, tanpa dikaitkan dengan kepentingan politik aliran dan golongan. Membuka kesempatan kerja untuk menampung banyak orang memperoleh pendapatan. Melakukan inovasi dan kreativitas yang mampu mengajak partisipasi masyarakat banyak, adalah beberapa kegiatan yang pro kaum miskin. Oleh karena itu diperlukan manusia altruis, manusia Pancasila, yang memiliki sisi ketuhanan sekaligus mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

Aksi untuk melibatkan diri pada kaum miskin yang mendesak dilakukan saat ini oleh masyarakat adalah menumbuhkan kesejahteraan mereka yang miskin dengan memberi dan menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan yang murah dan mudah dengan potensi yang ada, dan memberikan “beasiswa” kepada mereka yang miskin. Karena keterbatasan, orang Indonesia belum mampu berperan seperti seperti Bunda Teresa, yang mengumpulkan gelandangan pada jam-jam terakhir menjelang kematiannya. Kesetiakawanan Bunda Teresa dengan kawan-kawannya adalah satu jalan mengikuti Tuhan, hadir dan menemani penuh bela rasa. Demikian pula apa yang telah dilakukan oleh Pater Werner pada tahun 1970-1975 yang menemani tahanan politik di Pulau Buru. Kehadiran itu bagi mereka adalah berkah yang memberikan pengharapan.¹⁴

Masih banyak model pelibatan diri untuk memanusiakan orang miskin di daerah-daerah terpencil di tengah hutan, di pinggir pantai, atau di tempat-tempat miskin yang kekurangan pangan. Menjadi misionaris ke Sanggau Ledo, Manokwari, Wamena, Serui, Lembata, Mentawai, Nias, dan daerah-daerah tertinggal di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pendidikan dan pelatihan yang bermuara pada penumbuhan rasa percaya diri bagi manusia sudah merupakan kewajiban.

Keterlibatan masyarakat Indonesia untuk masa depan adalah perjuangan cinta kasih dan keadilan, membangun persaudaraan semua orang, mendahulukan kaum miskin. Pentingnya “Komunitas Basis Manusiawi” dan “Komunitas Basis Antar Iman”. Dalam hubungannya dengan keyakinan lain, Iman mempunyai dimensi keterlibatan bersama untuk

¹³ Ibid. Hal.138.

¹⁴ Ibid. Hal. 142.

kesejahteraan hidup bersama, melawan ketidakadilan. Nilai-nilai pengalaman religius lain memperkaya dalam dialog dan kerjasama.¹⁵.

Munculnya disharmoni antariman yang selama ini dirasakan adalah keridakmampuan memahami dan merasakan pengalaman religius lain dan berusaha untuk meningkatkan toleransi dan kerjasama. Menggunakan alat musik lengkap yang keras dan bising di lingkungan yang tenang misalnya, dapat mengundang reaksi protes kalau peserta ibadah tidak memahami konteks beribadah. Kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungan sosialnya pada akhirnya dapat menciptakan dialog dan kerjasama dalam memerangi kemiskinan dan pembodohan.

Sudah seharusnya masyarakat sanggup berkorban. Keikutsertaan dalam kegiatan masyarakat dalam kerja bakti, ronda malam, dan “mbangun desa” merupakan bentuk sosialisasi yang tidak terpisahkan dari komunitas. Masyarakat berupaya dapat memberi pelayanan kepada masyarakat miskin dengan membagi-bagi berkat dalam kegiatan keagamaan dengan pemberian sembako, pelayanan kesehatan, bakti masyarakat, bahkan keterlibatan warga dalam berbagai persoalan di masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka yang sakit diberi obat. Mereka yang kekurangan makan diberi makanan. Mereka yang tidak pernah ganti baju diberi pakaian. Mereka yang tidak bisa sekolah diberi beasiswa. Mereka yang tidak memiliki tempat tinggal diberi tumpangan. Jika hal itu dilakukan, masyarakat dapat berjalan tanpa harus dipaksa berjalan.

H. Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Karakter

Untuk mengajari manusia Indonesia mempraktikkan nilai-nilai disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai pengamalan Pancasila tidaklah mudah. Kita tidak menyaksikan ketertiban orang berkendara di Jalan Raya Jakarta yang mengakibatkan macet setiap hari. Kita tidak menyaksikan orang antri untuk turun dari pesawat, naik kereta api, dan bus. Kita juga tidak menyaksikan masyarakat untuk hidup bersih, membuang sampah di tempatnya. Hanya sebagian elit Indonesia yang sudah mapan pendidikan dan ekonomi yang dapat hidup “tertib” dalam mengantri dan menjaga fasilitas umum. Oleh karena itu perlu nilai-nilai Dasar Pancasila yang dapat dielaborasi dalam pendidikan karakter.

¹⁵ Banawiratma, JB dan Muller, J, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu. Kemiskinan sebagai Tantangan Hidup Beriman*, Yogyakarta: Kanisius, 1993. Hal 237.

Nilai dasar sila kerakyatan seperti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan, kontradiktif dengan praktik politik yang kita lihat di layar televisi. Sikap saling menyalahkan antarpolitisi, sikap menghindar dari tanggung jawab, sikap koruptif bertentangan dengan nilai yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, perlu pendidikan karakter seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pasal 4 UU No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pengembangan pendidikan karakter yang selaras dengan pendidikan moral Pancasila, paling tidak mengandung 13 nilai dasar seperti jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, peduli, berintegritas, rajin, hati-hati, taat, pengampun, teratur, menghargai orang lain, bekerjasama, dan bersahabat. Ketiga belas karakter utama tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan saling bergubungan antar karakter yang satu dengan yang lain. Orang yang jujur biasanya bertanggung jawab, dan berintegritas. Orang yang rajin pasti teratur, dan dapat dipercaya. Orang bisa menghargai orang lain pasti bisa bekerjasama.

Bahkan karakter dapat dikembangkan dari keyakinan iman para pendukungnya seperti kasih, sukacita perdamaian, kesabaran, kerendahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Deskriptor karakter seperti tersebut di atas dapat menjadikan orang pengasih,, pendamai, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan penguasaan diri. Munculnya perkelaian karena tidak ada kasih. Munculnya korupsi karena tidak ada sukacita, munculnya kekerasan karena tidak ada perdamaian, munculnya kemarahan karena tidak ada kesabaran, munculnya sifat egois karena tidak ada murah hati, munculnya kejahatan karena tidak ada kebaikan, terjadinya selingkuh dan

kebohongan karena tidak ada kesetiaan, terjadinya kekasarfan karena tidak adanya kelemahlembutan, terjadinya emosi karena tidak adanya penguasaan diri.

Beberapa hal karakter negatif yang harus dihindari adalah marah tanpa alasan, pendendam, irihati, egois, dan sombong. Kelima karakter negatif tersebut harus dieliminir sejak dini dalam pendidikan yang dapat dilakukan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat

I. Cara Pengembangan Karakter bernilai Pancasila

Ada berbagai cara membangun karakter baik yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah.

Pertama, dengan mengenalkan karakter tokoh yang ada dalam Kitab Suci. Melalui tokoh-tokoh dalam Kitab Suci, anak dapat belajar karakter keimanan, ketaqwaan, kesetiaan, kejujuran, kedisiplinan, keluhuran budi, dan kesucian dsb.

Kedua, dengan pembelajaran dari cerita rakyat. Tokoh Malin Kundang, Mitos Tangkuban Perahu, Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang, Roromendut dan Pronocitro, Putri Salju, Juwita dan Sirik, Ande-Ande Lumut, Inu Kertapati dan Galuh Candra Kirana dsb. Melalui cerita rakyat, anak dapat mencontoh tokoh-tokoh baik dan menghindarkan diri dari tokoh jahat.

Ketiga, dengan mengenalkan tokoh lokal, regional, nasional, dan internasional melalui biografi dan autobiografinya. Mengenalkan Bung Hatta dengan kesahajaannya, Mengenalkan Jendral Sudirman dengan perjuangannya bersama rakyat. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Bunda Teresa. Mengenalkan Tjut Nyak Dien, R.A.Kartini. Christina Martha T, Imam Bonjol, Pangeran Dipanegara,dsb. Dengan mengenalkan tokoh-tokoh siswa dapat belajar keteguhan hati, permaafan, pengorbanan, dst.

Keempat, belajar dari kehidupan sehari-hari. Kisah tukang sampah, tukang pasir, PRT, PSK, sopir, nakoda, pilot, tukang bangunan, buruh tani, buruh pabrik dsb. Belajar dari kerja keras orang-orang marjinal untuk menghayati arti kerja keras golongan rakyat bawah. Pengembangan karakter juga bisa dilakukan dengan belajar kepada politisi seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Tan Malaka, walaupun berbeda ideologi

dan cara pandang, mereka tetap bersahabat. Belajar dari pengusaha, supaya menghargai arti kerja keras.

Kelima, belajar dari media massa. Tayangan televisi *Reality show* seperti *Andaikan Aku Menjadi*, *Tolong*, *jejak Petualang*, dll, dapat mengasah kepekaan karakter. Membaca rubrik konsultasi psikologi, membaca features tokoh dalam Surat kabar dan majalah dapat menambah indikator karakter.

Keenam, laksanakan pendidikan karakter sesuai dengan konteks budayanya. Misalnya, tradisi lahir, perkawinan, kematian dalam tradisi suku, ritual dan budaya dalam konteks budaya.

Ketujuh, pantau terus pendidikan karakter oleh orang tua. Pemantauan dilakukan baik di sekolah dengan berinteraksi dengan pamong sekolah, di luar sekolah dengan mengetahui Peer group atau kelompok bermain dan kegiatannya. Anak baik dengan karakter baik akan menjadi anak jahat bila ada di lingkungan jahat.

J. Kesimpulan

Mempraktikkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan Pancasila dalam pemberdayaan orang miskin, selain dilakukan secara formal di pendidikan formal, informal, dan nonformal, juga diformulasikan dalam praktik berbangsa dan bernegara. Pada aras sosialisasi Pancasila, perlu penekanan lebih dalam praktik berbangsa dilaksanakan dalam pendidikan seperti yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Setidaknya setiap warga negara mengerti dan mempraktikkan nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia.

Mendahulukan orang miskin, selain bedimensi ketuhanan dan kemanusiaan, juga merupakan praktik belarasa, berbagi kasih kepada saudara kita yang tertimpa kemiskinan, yang disebabkan oleh ketidkadilan. Program-program *Charity* yang dilakukan lembaga amal, sekolah, kampus, organisasi agama dan organisasi sosial, bukan hanya berperan sebagai sinterklas yang membagi hadiah, namun juga mampu memberdayakan orang miskin untuk mandiri. Kemiskinan permanen di Indonesia harus diatasi khususnya dalam penyediaan pangan, kesehatan dan pendidikan. Kita tidak akan

keluar dari krisis kualitas SDM, bila rakyat masih susah membeli makan, memperoleh kesehatan, dan pendidikan.

Mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, memerlukan karakter manusia Indonesia yang jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, peduli, berintegritas, rajin, hati-hati, taat, pengampun, teratur, menghargai orang lain, bekerjasama, dan bersahabat. Mampu menjadi manusia yang pengasih, pendamai, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan dapat mengusasi diri. Dapat menghindari marah tanpa alasan, pendendam, irihati, egois, dan sombong. Jika itu semua dilakukan melalui pendidikan yang baik di keluarga, di sekolah, di masyarakat oleh orang-orang yang baik, ke depan Indonesia akan menuai masyarakat maju dan modern yang tidak lepas dari nilai Pancasila yang sudah dirumsukan oleh pendiri bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Bagong Suyanto, *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.

Banawiratmam, JB dan Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Banawiratma, SJ, *10 Agenda Pastoral Transformatif: Menuju Pemberdayaan Kaum Miskin dengan Perspektif Adil Gender, HAM, dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Banawiratma, JB, "Teologi Fungsional-Kontekstual" dalam *Konteks Berteologi di Indonesia* (Eka Darmaputera, Editor), Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.

Brownlee, Malcolm, *Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan: DasarTheologis bagi Pekerjaan Orang Kristen dalam Masyarakat*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.

Tjondronegoro, Soediono M.P., "Dinamika Golongan lemah Pedesaan: Refleksi atas Karya Tulis dan Pemikiran Dr. Sajogyo" dalam *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 1996.

White, Benjamin, "Optimisme Makro, Pesimisme Mikro? Penafsiran Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia 1967 – 1987. dalam *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 1996.

